

**RENCANA KERJA  
TAHUN 2024**  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Tapin



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BKPSDM**  
*Tahun 2023*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji kita sembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dapat diwujudkan.

Dengan selesainya Rancangan Rencana Kerja ini diharapkan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran kegiatan pada tahun 2024 bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya secara baik dan benar (good Governance) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Bupati Tapin dan masyarakat.

Materi yang terkandung dalam Rancangan Rencana Kerja ini selain merupakan pedoman/arah anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, juga memuat hasil dari kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada tahun 2023, dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta aspek anggaran yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat program.

Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masa mendatang.

Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini, baik yang secara aktif terlibat langsung dalam penyusunannya, maupun narasumber yang mendukung kesempurnaan Rencana Rerja ini. Dan kami mengharapkan, semoga Rencana Kerja ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin.

Rantau, Maret 2023  
Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin,



Drs. H. SYAIFUL BAHRIN NOOR  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19630419 198503 1 007

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pembangunan Kabupaten Tapin lima sampai sepuluh tahun kedepan adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten **Tapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis**. yakni sebuah kabupaten yang kehidupan masyarakatnya selalu diwarnai dengan nilai-nilai agamis yang dipegang teguh dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dalam interaksi sosial sehari-hari.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin di bidang kepegawaian, maka dengan sendirinya BKPSDM mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses kepegawaian Kabupaten Tapin dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga dapat mengarah pada visi, misi

Kabupaten Tapin seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk mencapai strategi tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dituntut mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD) yang berlaku selama satu tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dari rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKPSDM) Kabupaten Tapin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2020;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengarusutamaan Gender.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman arah pelaksanaan kegiatan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan rancangan rencana kerja tahun 2024 yaitu :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra BKPSDM.
2. Agar program/ kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
4. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
5. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja BKPSDM Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- I. Pendahuluan yang terdiri dari :
  - I.1 Latar Belakang
  - I.2 Landasan Hukum
  - I.3 Maksud dan Tujuan
  - I.4 Sistematika Penulisan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Tapin yang terdiri dari
  - II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Tapin
  - II.2 Analisa Kinerja Pelayanan
  - II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  - II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang terdiri dari :

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

III.3 Program dan Kegiatan

IV. Rencana Kerja dan Pendaan Perangkat Daerah.

V. Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BKPSDM dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BKPSDM, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BKPSDM terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Tapin tahun 2021 dan capaian Renstra BKPSDM**

Evaluasi pelaksanaan renja BKPSDM tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BKPSDM ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan BKPSDM dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BKPSDM berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA RENCANA STRATEGIS PER TRIWULAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN  
TAPIN TAHUN 2023**

Sasaran kinerja / kinerja utama	Indikator IKU	Target IKU				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				90	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						
						Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Terlaksananya penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun	15.459.800	-	-	-	75%	Bidang Pengadaan, Pensiun, dan Informasi
						Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN lainnya)	20.744.000	-	-	-	75%	Bidang PKA, Bangriar, Disiplin Aparatur
						Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	40.700.000	-	-	-	75%	Bidang Pengadaan, Pensiun, dan Informasi
						Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	25.500.000	-	-	-	75%	Bidang Pengadaan, Pensiun, dan Informasi
						Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya pembuatan SK Mutasi ASN	3.000.000	-	-	-	75%	Bidang Pengadaan, Pensiun, dan Informasi
						Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya penyelesaian penempatan, pengangkatan, mutasi dan kepangkatan	64.380.000	-	-	-	75%	Bidang Pengadaan, Pensiun, dan Informasi

						Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengembangan Karier dan Promosi ASN	353.732.200	-	-	-	75%	Bidang PKA, Bangriar, Disiplin Aparatur
						Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Pelamar terhadap Penyelenggaraan Seleksi CASN						
						Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan	750.000	-	-	-	90%	Bidang Pengadaan, Pensiun, dan Informasi

						Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pengadaan ASN						
						Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya penyusunan analisis kebutuhan, formasi, dan pelaksanaan pengadaan ASN	379.728.400	-	-	-	90%	Bidang Pengadaan, Pensiun, dan Informasi
Meningkatnya kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya				100	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN						
						Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN	20.000.000	-	-	-	50%	Bidang PKA, Bangriar, Disiplin Aparatur
						Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya pembinaan disiplin ASN	32.250.000	-	-	-	90%	Bidang PKA, Bangriar, Disiplin Aparatur
						Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengembangan Karier dan Promosi ASN	353.732.200	-	-	-	75%	Bidang PKA, Bangriar, Disiplin Aparatur
						Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional	22.299.900	-	-	-	75%	Bidang PKA, Bangriar, Disiplin Aparatur
Optimalisasi pelaksanaan diklat ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat				79%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Jabatan Struktural yang terisi oleh Pejabat yang sesuai kompetensinya						

						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	521.046.800	-	-	-	75%	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
						Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1.557.147.000	-	-	-	50%	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pendidikan Lanjutan ASN	200.900.000	-	-	-	50%	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi BKPSDM, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.

Format tabel pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS & FUNGSI BKPSDM KABUPATEN TAPIN**

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi, BKPSDM Kabupaten Tapin mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan fungsi pelayanan kepegawaian SKPD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut adalah :

1. Tuntutan pelayanan yang lebih efektif dan efisien semakin meningkat.
2. Selalu berubah nya data kepegawaian sesuai SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dikarenakan banyaknya mutasi PNS masuk maupun keluar dari lingkungan Pemkab. Tapin, dan masih ada PNS mutasi yang belum menyerahkan data ter update.
3. Terbatasnya anggaran BKPSDM dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung penataan sumber daya aparatur.

### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKPSDM berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:



**Rumusan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**

**Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

**KABUPATEN TAPIN**

**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2024	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	AP BD Pro v	AP BN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif( Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10

	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						9.990.45 3.247	0	0		10.489.97 5.909
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Terlaksananya urusan pelayanan administrasi Umum, Kepegawaian, dan kinerja SKPD	12 bulan	5.923.77 4.647	0	0	12 bulan	6.219.963 .379
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			TAPIN	Jumlah Laporan Wajib yang dibuat	10 Dokumen	47.769.1 00	0	0	10 Dokumen	50.157.55 5



	Daerah										
X.XX.01.2. 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	6.943.20 0	0	0	1 Dokumen	7.290.360
X.XX.01.2. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokum en	2.650.00 0	0	0	1 Dokumen	2.782.500
X.XX.01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			BKPSDM Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	8 Laporan	38.175.9 00	0	0	8 Laporan	40.084.69 5

	Kinerja SKPD				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
X.XX.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	6 Laporan	3.802.38 0.397	0	0	6 Laporan	3.992.499 .417
X.XX.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			BKPSDM Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.299.80 0	0	0	1 Laporan	4.514.790
X.XX.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan			BKPSDM Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	4 Laporan	23.703.5 00	0	0	4 Laporan	24.888.67 5

	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						
X.XX.01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokum en	4.550.00 0	0	0	2 Dokumen	4.777.500
X.XX.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			BKPSDM Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/b ulan	3.769.82 7.097	0	0	30 Orang/bulan	3.958.318 .452
X.XX.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			KALIMA NTAN SELATA	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Rakoor	1 Kegiata n	65.675.0 00	0	0	1 Kegiatan	68.958.75 0

				N	Kepegawaian						
X.XX.01.2. 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			Kalimantan Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	65.675.0 00	0	0	100 Orang	68.958.75 0
X.XX.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum BKPSDM Tapin sesuai kebutuhan yang layak pakai	12 bulan	1.337.11 0.725	0	0	12 bulan	1.403.966 .261
X.XX.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			BKPSDM Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.501.4 45	0	0	1 Paket	37.276.51 7

X.XX.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			BKPSDM Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29.310.2 00	0	0	1 Paket	30.775.71 0
X.XX.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			BKPSDM Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	117.450. 000	0	0	1 Paket	123.322.5 00
X.XX.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			BKPSDM Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	27.150.0 00	0	0	1 Laporan	28.507.50 0
X.XX.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Indonesi a	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	864.762. 000	0	0	1 Laporan	908.000.1 00
X.XX.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan			BKPSDM Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	262.937. 080	0	0	1 Paket	276.083.9 34

	Kantor				yang Disediakan						
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Tersedianya Dokumen Pembayaran Rekening Listrik, Internet, Telepon, dan Jasa Administrasi	12 bulan	451.628.800	0	0	12 bulan	474.210.240
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			BKPSDM TAPIN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	192.428.800	0	0	12 Laporan	202.050.240
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			BKPSDM TAPIN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	259.200.000	0	0	12 Laporan	272.160.000

X.XX.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Tersedia dan Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik	12 bulan	219.210. 625	0	0	12 bulan	230.171.1 56
X.XX.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			BKPSDM TAPIN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.329.5 00	0	0	1 Unit	29.745.97 5
X.XX.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			BKPSDM TAPIN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	85.743.0 00	0	0	50 Unit	90.030.15 0

X.XX.01.2. 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			BKPSDM TAPIN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	105.138.125	0	0	1 Unit	110.395.031
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
05.03	KEPEGAWAIAN										
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	3.548.968.600	0	0	90%	3.726.417.030
					Nilai Indeks Profesionalitas ASN	75%				75%	



					Persentase Pejabat Struktural yang Lulus Diklat Jabatannya	50%				50%	
					Persentase ASN Fungsional yang Lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	80%				80%	
					Persentase Jabatan Struktural yang Terisi oleh Pejabat yang Sesuai Kompetensinya	90%				90%	
					Persentase Pegawai yang Berkinerja Tinggi	100%				100%	
5.03.02.2.0 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi			KALIMA NTAN SELATA	Terlaksananya Kegiatan Seleksi CASN, Terbitnya SK	1 tahun	927.729. 000	0	0	1 tahun	974.115.4 50

	Kepegawaian ASN			N	Administrasi Kepegawaian						
5.03.02.2.0 1.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			BKPSDM TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokum en	3.300.00 0	0	0	1 Dokumen	3.465.000
5.03.02.2.0 1.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			KALIMA NTAN SELATA N	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokum en	743.715. 000	0	0	1 Dokumen	780.900.7 50
5.03.02.2.0 1.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN			BKPSDM TAPIN DAN BKD PROVIN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokum en	52.232.0 00	0	0	1 Dokumen	54.843.60 0

				SI KALSEL							
5.03.02.2.0 1.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			BKPSDM TAPIN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	20.282.0 00	0	0	1 Lembaga	21.296.10 0
5.03.02.2.0 1.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			BKPSDM TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	82.700.0 00	0	0	1 Dokumen	86.835.00 0
5.03.02.2.0 1.11	Pengelolaan Data Kepegawaian			BKPSDM TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	25.500.0 00	0	0	1 Dokumen	26.775.00 0
5.03.02.2.0 2	Mutasi dan Promosi ASN			TAPIN	Terbitnya SK Mutasi dan Promosi ASN	1 Tahun	574.261. 700	0	0	1 Tahun	602.974.7 85
5.03.02.2.0 2.01	Pengelolaan Mutasi ASN			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan	50 Dokumen	3.580.00 0	0	0	50 Dokumen	3.759.000

					Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah						
5.03.02.2.0 2.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			BKPSDM Tapin, BKD Prov. Kalsel, BKN Kanreg VIII	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	250 Dokum en	129.999. 800	0	0	250 Dokumen	136.499.7 90
5.03.02.2.0 2.03	Pengelolaan Promosi ASN			Kalimant an Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokum en	440.681. 900	0	0	4 Dokumen	462.715.9 95
5.03.02.2.0 3	Pengembangan Kompetensi ASN			INDONE SIA	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan	12 bulan	1.706.26 2.900	0	0	12 bulan	1.791.576 .045

					Kompetensi Bagi ASN Kab. Tapin						
5.03.02.2.0 3.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	75 Orang	82.775.000	0	0	75 Orang	86.913.750
5.03.02.2.0 3.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			INDONESIA	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	100.900.000	0	0	1 Orang	105.945.000
5.03.02.2.0 3.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			BPSDMD PROV. KALSEL	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1.503.888.000	0	0	1 Dokumen	1.579.082.400
5.03.02.2.0 3.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			BKPSDM TAPIN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1 Orang	18.699.900	0	0	1 Orang	19.634.895

5.03.02.2.0 4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			KALIMANTAN SELATAN	Terlaksananya Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 bulan	340.715.000	0	0	12 bulan	357.750.750
5.03.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			BKPSDM TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	172.390.000	0	0	1 Dokumen	181.009.500
5.03.02.2.0 4.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			BKPSDM TAPIN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	16.075.000	0	0	50 Orang	16.878.750
5.03.02.2.0 4.07	Pembinaan Disiplin ASN			BKPSDM TAPIN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25 Orang	152.250.000	0	0	25 Orang	159.862.500

05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Nilai Indeks Profesionalitas ASN	75%	517.710.000	0	0	75%	543.595.500
5.04.02.2.0 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			INDONESIA	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Bagi ASN KAB. TAPIN	12 bulan	517.710.000	0	0	12 bulan	543.595.500
5.04.02.2.0 2.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan			INDONESIA	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	3 Laporan	517.710.000	0	0	3 Laporan	543.595.500

	Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



## **2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Untuk tahun 2023 tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang akan masuk dalam anggaran BKPSDM Kabupaten Tapin.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin maka BKPSDM Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan wajib Pemerintahan. Tugas yang diberikan adalah dalam rangka untuk terbinanya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan *good governance*.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-SKPD

Tujuan Renja-SKPD BKPSDM Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran BKPSDM**  
**Kabupaten Tapin**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2024	Akhir periode
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Poin	90 Poin
Meningkatkan kapasitas kinerja kelembagaan di setiap perangkat daerah	Meningkatnya Kesesuaian Kompetensi ASN dengan Jabatan/Tupoksi yang dijalankan	Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan Kompetensinya	100%	100%
Meningkatkan kompetensi kinerja ASN	Optimalisasi pelaksanaan diklat ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	82%	82%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	27,18 Point	27,18 Point
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	21,56 Point	21,56 Point

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2024	Akhir periode
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	12,23 Point	12,23 Point
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	8,14 Point	8,14 Point

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Lampiran III.3**.

## BAB IV

### RENCANA KERJA dan PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Tapin Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.319.600
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.649.600
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.175.200
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	3.644.293.950
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.119.600
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48.278.800
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	38.959.600
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	114.471.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.079.000
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.357.800
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.386.800
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.296.800
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	879.312.500
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	113.779.800
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.120.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.207.150
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	51.726.880
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	31.071.000
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>		
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.299.600
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	488.903.450
3	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	87.247.000
4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	20.035.200
5	Pengelolaan Data Kepegawaian	136.450.300
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>		
1	Pengelolaan Mutasi ASN	39.564.800
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	144.570.000
3	Pengelolaan Promosi ASN	420.721.650
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>		
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	82.759.600
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	304.899.600
3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	2.120.223.400
4	Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	40.296.000
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.192.310
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	15.192.310
3	Pembinaan Disiplin ASN	53.231.200

	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.821.019.600
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.006.415.000</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang juga merupakan pelaksanaan tahun ke 3 (tiga) dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya guna tercapainya tujuan, sasaran, program-program pembangunan yang berpedoman terhadap RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 serta mengacu kepada renstra SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Pelaksanaan kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar SKPD dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD tersebut

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tapin tahun 2022 ini, kiranya dapat memberi arah, acuan dan pedoman bagi kegiatan – kegiatan BKPSDM, sehingga Visi, Misi, dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

 **BUPATI TAPIN,**



**M. ARIFIN ARPAN**